



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN



LAPORAN TAHUNAN

2022



icare

e.gov
PASTI Nyata

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAKASASI MANUSIA**

ALWAYS THE BEST



**REVOLUSI DIGITAL
KEMENKUMHAM**

PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada seluruh makhluk-Nya. Tak terkecuali kepada kami, sehingga dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif dapat mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran menuju *good governance*. Pada prosesnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dapat merumuskan dan menyusun Laporan Tahunan Tahun 2022 .

Laporan tahunan ini disusun sebagai upaya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu berfungsi Sebagai upaya mewujudkan *good governance* jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun anggaran 2022. Selain itu pula untuk mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, laporan tahunan ini menjadi sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten dan jajaran untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berjalan dengan baik dan lancar walaupun dalam keadaan pandemi di tahun 2022, Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan jajaran berada pada angka 99,38 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh delapan persen), baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM maupun kegiatan teknis lainnya.

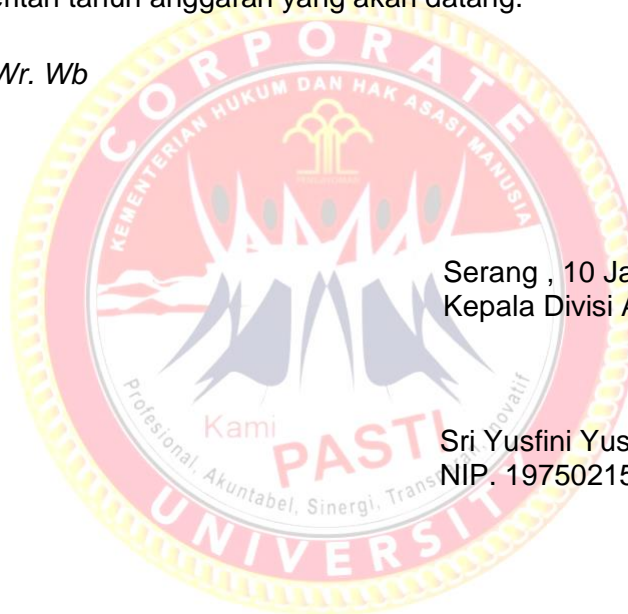
Selanjutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, selama tahun anggaran 2022 Kanwil Kemenkumham Banten telah menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam 6 (enam) area perubahan dan mengembangkan berbagai program berbasis elektronik (*e-government*) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan memberikan pelayanan publik terbaik di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan

HAM Banten adalah muara akhir tujuan seluruh jajaran Kemenkumham. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, harapan publik akan pelayanan sesuai aturan akan terwujud dan masyarakat memperoleh kepastian. Dengan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif.

Dan terakhir Kami haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini. Kami harapkan sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Serang , 10 Januari 2023
Kepala Divisi Administrasi

Sri Yusfina Yusuf
NIP. 197502152001122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Wilayah	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Maksud dan Tujuan	10
E. Ruang Lingkup Pembahasan	10
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	
A. Visi, Misi, Tata Nilai Dan Program Kantor Wilayah	12
B. Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan HAM	
BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
A. Capaian Prestasi	21
B. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Divisi Administrasi	
2. Divisi Pemasyarakatan	22
3. Divisi Keimigrasian	
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	56
C. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dapat juga dijadikan sebagai alat pembaharuan, apabila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan yang ditandai dengan adanya kesediaan dari aparatur birokrasi untuk bersikap responsif terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan sehingga dapat terciptanya sistem pemerintahan yang baik (good governance).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggara negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terselenggaranya good governance juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Laporan Tahunan Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kurun waktu satu tahun yang pelaksanaannya didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Banten Nomor 013.01.2.408720/2022 Tanggal November 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan Urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah;

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berlokasi

di Jalan KH.Syam'un No.44D Serang Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang. Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, dengan total area \pm 9.663 Km² dengan jumlah penduduk \pm 9.953.414 jiwa (sumber : <https://banten.bps.go.id>). sejalan dengan berdirinya provisi Banten, serta guna mendukung pelaksanaan tugas antar instansi vertikal dan pemerintahan daerah yang baru ini maka didirikan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Banten melalui Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI nomor : M.74.PR.09.02 tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten meliputi:

1. Kabupaten Serang (1.467 km²)
2. Kabupaten Lebak (3.427 km²)
3. Kabupaten Pandeglang (2.747km²)
4. Kabupaten Tangerang (959,6km²)
5. Kota Serang (266,7km²),
6. Kota Cilegon (175,5km²,
7. Kota Tangerang (153,9km²)
8. Kota Tangerang Selatan (147,2km²).

Unit Pelaksana Teknis meliputi :

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tangerang
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
3. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
5. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang
6. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Serang
7. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Cilegon
8. Lembaga Pemasarakatan Terbuka Ciangir
9. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Rangkas Bitung
10. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang
11. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang

12. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang
13. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang
14. Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang
15. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
16. Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir
17. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang
18. Kantor Imigrasi Kelas I Serang
19. Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok, tersebut susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri dari :

1. Divisi Administrasi;
2. Divisi Pemasyarakatan;
3. Divisi Keimigrasian;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kanwil dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Kantor Wilayah
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi

DIVISI PEMASYARAKATAN

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;
- b. pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dilingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administras

DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah

Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dilingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administras

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan
- b. pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dilingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tahunan merupakan laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, Dengan demikian, laporan tahunan merupakan sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten dan jajaran untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
3. Memahami akan keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas dan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
4. Memberikan informasi kepada Pimpinan organisasi berkenaan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2022;
5. Bahan masukan pimpinan organisasi dalam hal pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan serta program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

E. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan pada Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten adalah:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten baik dalam bentuk Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum
2. Pengelolaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama Tahun Anggaran 2022

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Pada Bab ini akan menguraikan tentang program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2022 berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Untuk itu, dalam Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2022 dikemukakan, Visi, Misi, Tata Nilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

A. VISI, MISI, TATA NILAI DAN PROGRAM KANTOR WILAYAH

VISI	Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas
TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none">1. Profesional2. Akuntabel3. Sinergi4. Transparan5. Inovatif

PROGRAM KANTOR WILAYAH :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
6. Program Pembinaan Hukum Nasional
7. Program Pembentukan Hukum
8. Program Administrasi Hukum Umum
9. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penataan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut masih berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program, oleh sebab itu diperlukan operasionalisasi dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan. Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Divisi Administrasi

- a. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor wilayah;
- b. Layanan keuangan Kanwil Kemenkumham;
- c. Layanan penata usahaan BMN Kanwil Kemenkumham;
- d. Layanan kepegawaian Kanwil Kemenkumham;
- e. Layanan kehumasan Kanwil Kemenkumham;
- f. Layanan perkantoran;
- g. Peralatan dan fasilitas perkantoran;
- h. Gedung/ bangunan.
- i. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Divisi Pemasarakatan

Penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah Untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan pemsarakata diwilayah, Divisi Pemasarakatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

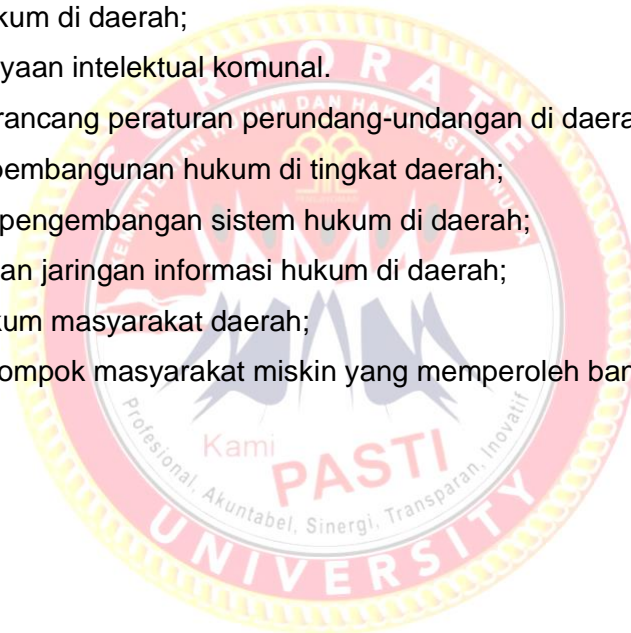
- a. Melaksanakan fungsi Bintorwasdal terhadap UPT PAS;
- b. Menerima usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dari Lapas/Rutan;
- c. Menerima laporan bulanan dari UPT;
- d. Menerima usulan remisi dari Lapas/Rutan;
- e. Monitoring Sistem Database Pemasarakatan (SDP);
- f. Melaksanakan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) secara terjadwal dan insidental di seluruh UPT PAS;
- g. Pengarsipan data Divisi Pemasarakatan.

3. Divisi Keimigrasian

Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. Untuk merealisasikan kegiatan Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen RKA-K/L fungsi Keimigrasian;
- b. Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian;

- c. Pembinaan Koordinasi dan konsultasi program kegiatan;
 - d. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang lalu lintas dan izin tinggal Ke imigrasian
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- a. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang notariat;
 - c. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang kewarganegaraan.
 - d. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;
 - e. Hasil kajian hak asasi manusia.
 - f. Dokumen permohonan HKI yang diterima Kantor Wilayah;
 - g. Promosi dan diseminasi di daerah;
 - h. Penegakan hukum di daerah;
 - i. Database kekayaan intelektual komunal.
 - j. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah.
 - k. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat daerah;
 - l. Penelitian dan pengembangan sistem hukum di daerah;
 - m. Dokumentasi dan jaringan informasi hukum di daerah;
 - n. Kesadaran hukum masyarakat daerah;
 - o. Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum



CAPAIAN KINERJA ORGANISAS TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama. Selain itu, dalam tataran ideal, akuntabilitas tersebut sebagai pengukuran atas tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, rencana strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sistem penyampaian pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Masyarakat, Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi serta Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Banten. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyusun Laporan Tahunan tahun 2022 dengan berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Banten yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut:

A. CAPAIAN PRESTASI

1. Penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Diseminasi Pelayanan Hukum dan HAM secara Daring *Non-stop Terlama* (Podcast 100 Jam)
2. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Kantor Wilayah Banten Meraih Peringkat Kedua atas Kinerja Anggaran di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2022
4. Kantor Wilayah Banten meraih Penghargaan atas Pelaksanaan Program Unggulan Terwujudnya Klinik Kekayaan Intelektual melalui Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic)

5. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM Kepada Kantor Wilayah Banten yang telah Berkolaborasi melalui Layanan Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah, dan Bank dalam Fasilitasi Permohonan Kekayaan Intelektual
6. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Kantor Wilayah Banten yang telah Menerapkan Kreativitas Pelayanan Publik Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan Menggagas Aplikasi PEPITO
7. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten yang telah Menyukseskan Program Unggulan DJKI Mobile Intellectual Property Clinic, DJKI Mengajar, dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2022

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. DIVISI ADMINISTRASI

Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2022 pelaksanaan tugas Divisi Adminitrasi dilaksanakan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Penyusunan Pelaporan Humas dan TI dijabarkan dalam tabel berikut :

Capaian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan persuratan dan tata usaha tahun 2022	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2022
2.	Arahan Kepada 4 Cdns Kanwil Kemenkumham Banten,	CPNS Kanwil Kemenkumham Banten CPNS TA 2022
3.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan eselon III, IV dan V, Jabatan JFT Perancang, Pembimbing Kemasyarakatan, Analis Keimigrasian, Arsiparis, dan Analis Kepegawaian	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2022
4.	Penerbitan SK Hukuman Disiplin, Penerbitan KGB, SK Mutasi/ Pindah, Cuti Pegawai, Surat Ijin Kuliah, Laporan selesai kuliah, penghargaan Satyalancana, pensiun.	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2022
5.	Gelar Kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022	di ikuti oleh kasubag pengelola keuangan dan BMN beserta staf keuangan
6.	Audiensi ke beberapa steckholder dalam rangka sinergisitas kegiatan-kegiatan da	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2022

7.	Rapat Pembahasan Sasaran Kinerja Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) haruslah di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	diikuti oleh pegawai div.adminitrasi
8.	mengikuti Bimbingan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan secara daring oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI	diikuti oleh JFT Arsiparis
9.	Mitigasi terkait resiko keterlambatan pelaksanaan pengadaan BAMA, khususnya pekerjaan fisik bagi Satuan Kerja yang mendapatkan alokasi anggaran belanja modal di TA. 2023	di ikuti oleh kasubag pengelola keuangan dan BMN dan staf keuangan
10	Do'a Bersama Sukseskan KTT G20: Do'a Lintas Agama dari Kemenkumham, untuk Dunia yang Pulih dan Tumbuh Lebih Kuat	didikuti oleh seluruh pegawai
11.	kegiatan triwulan II tahun 2021. Pahami Regulasi, Ppbj Kanwil Kumham Banten Ikuti Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan	diikuti oleh pejabat JFT barjas
12.	Ppbj Kanwil Kumham Banten Ikuti Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan	diikuti oleh JFT Barjas
13.	Subbagian Kepegawaian Ikuti Rapat Persamaan Persepsi Penyusunan Sasaran Dan Penilaian Kinerja Secara Virtual	diikuti oleh kasubag kepegawaian dan staf yang di tunjuk
14.	menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kementerian	diikuti oleh seluruh pegawai
15.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus memperkuat Strategi Publikasinya	dikuti oleh kabag PH dan Kasubsi HRBTI

16.	Pembahasan Usulan Sarana dan Prasarana UPT Masyarakat Tahun 2023 “Penanganan kelebihan kapasitas atau over capacity yang terjadi di sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia, saat ini telah menjadi Prioritas Nasional. Untuknya, dibutuhkan sinergitas dan kesamaan persepsi setiap Kantor Wilayah terkait kebutuhan sarana dan prasarana di Lapas/Rutan.”	dikuti oleh kabag umum, kasubag keuangan dan staf keuangan
17.	menyelenggarakan Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM yang diadakan secara Daring	dikuti oleh kabag PH, kasubag Program dan pelaporan dan staf Penyusunan program didampingi oleh kepala div.adminstrasi
18.	Reformasi Birokrasi mengikuti Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham secara daring	Kepala Divisi Administrasi, , didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Kepala Subbagian HRBTI, Yurista Dwi Atharini beserta jajaran
19.	Tim Assessment Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan Assessment bagi jajaran pegawai	pegawai yang mengikuti assessment
20.	Kanwil Banten Ikuti Pembahasan Pagu Minus Belanja Pegawai	diikuti oleh kasubag keuangan dan staf keuangan
21.	kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022. Untuk mewujudkan Kemenkumham yang Semakin PASTI, dan dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	dikuti oleh kabag umum, kasubag keuangan dan staf keuangan
22.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester II TA 2021 Tingkat Kantor Wilayah secara virtual melalui aplikasi zoom meeting,	dikuti oleh kabag umum, kasubag keuangan dan staf keuangan
23.	mengikuti pembukaan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan DUPAK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 secara daring,	Jajaran Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga bersama para Fungsional PPBJ
24.	menggelar sosialisasi kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2022	kasubag kepegawaian dan staf kepegawaian

25.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Agenda Kegiatan, Rencana Penarikan Kas, Pengadaan Barjas dan Rencana Penyerapan) Tahun Anggaran 2022	diikuti oleh jajaran Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pengawas dan JFT Muda dan Madya
26.	Deklarasi Janji Kinerja 2022 Kanwil Kemenkumham Banten, Dilanjutkan dengan penandatanganan secara digital Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Komitmen Bersama Janji Kinerja Tahun 2021, serta Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang disaksikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	diikuti oleh seluruh pegawai
27.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kembali melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dalam tajuk "Apa Kabar Keuangan Kita?" untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran satuan kerja di Wilayah Banten	perencanaan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya
28.	Kepala Div.Administrasi menggelar Rapat Penyusunan Kalender Kerja Triwulan I Divisi Pemasarakatan, Penyusunan Rencana Kerja dan Kalender Kerja, khususnya Triwulan I ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi antar Divisi	dengan isi kalender kerja setiap divisi
29.	Lakukan Evaluasi Pemenuhan Data dukung B.03 Pembangunan Zona Integritas, ngkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta sebagai implementasi Corporate University Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten kembali menggelar "Implementasi Corporate University	di ikuti oleh pegawai yang di tunjuk
30.	melakukan Analisa Kinerja Program dan Kegiatan serta Analisa Kebutuhan Sarpras (Belanja Modal) pada Unit Pelaksana Teknis	Diikuti oleh Kabag PH, Kasubbag PP, staf program pelaporan dan seluruh upt
31.	Membuat PK antara kakanwil dan para kadiv, antara kadiv dan para ka UPT. Membuat laporan LAKIP Tahun 2020, Membuat surat perubahan Nomenklatur UPT Pemasarakatan	untuk data dukung pada tarja
32.	Membuat surat pengantar usulan analisa kebutuhan anggarn TA 2022 program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program penegasan dan pelayanan hukum	di buat pada bagian pelaporan dan program
33.	Supervisi usulan anggaran belanja modal dan belanja sewa kantor wilayah TA 2022	usulan untuk kantor wilayah

34.	Belajar Pahami "Renstra" Lewat Corpu Kanwil Kemenkumham Banten, Renstra atau Rencana Strategik menjadi Tema yang diangkat dalam Corporate University atau Corpu yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Banten secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting	Kabag PH, Kabag Umum dan seluruh div.adminstrasi dan UPT
35.	Menyusun pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi B03 Kanwil Kemenkumham Banten yang diupload melalui aplikasi http://erb.kemenkumham.go.id	pegawai yang menangani RB
36.	Pelatihan Dasar CPNS Kemenkumham Tahun 2022 Resmi Dibuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara resmi telah dibuka, oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia.	meeting zoom
37.	Masuk Tahap Penilaian, Kumham Banten Lakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas 17 Satuan Kerja Tahapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memasuki Tahap Penilaian yang dimulai sejak 9 s.d. 12 Mei 2022	di verifikasi oleh masing-masing pokja
38.	Pembinaan Kehumasan di Bidang Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Manajemen Informasi dan Pemberitaan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Keterbukaan informasi publik merupakan	diikuti oleh kabag PH, Kasubbag HRBTI dan staf Humas
39.	Bangun Budaya Pelayanan Prima, Kasubag HRBTI Kanwil Kemenkumham Banten Jelaskan Tata Cara Penanganan Pengaduan	diikuti oleh kabag PH, Kasubbag HRBTI, staf Humas dan Upt
40.	Corporate University Kemenkumham Banten: Penyusunan dan Review LKIP Satker serta Strategi Pengisian SMART dan e-Monev Bappenas, kegiatan diikuti oleh Subbagian Program dan Pelaporan dan operator/pengelola LKIP, SMART dan E-Monev Bappenas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Banten	Diikuti oleh Kabag PH, Kasubbag PP, staf program pelaporan dan seluruh upt
41.	Corporate University: Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja menjadi Tema "Corporate University" yang digelar Kanwil Kemenkumham Banten	melalui Aplikasi Zoom Meeting
42.	Monev Penerapan Manajemen Resiko pada setiap UPT pas dan imigrasi	Kabag PH, kasubbag PP dan staf PP

43.	Wujudkan Pelaksanaan Anggaran Akuntabel, Kemenkumham Banten Lakukan Penyesuaian Pagu Anggaran dan Supervisi RKA-K/L TA. 2023	Kabag PH, kasubbag PP dan straf PP
44.	Hasil Survei IKM-IPK dan Integritas Periode Agustus 2022 Melalui Aplikasi 3AS Berbasis Elektronik, Dengan Hasil Sangat Baik (A).Kumham Banten SEMAKIN PASTI JAWARA	staf humas
45.	melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atau TLHP” dalam balutan “Implementasi Corporate University” yang digelar secara Virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting,	Kabag PH, kasubbag PP dan straf PP
46.	Supervisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap UPT pas dan imigrasi	Kabag PH, kasubbag PP dan straf PP
47.	Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfina Yusuf melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten di Jakarta	diiikuti oleh kabag umum
48.	Pengelola BMN Kemenkumham Banten Lakukan Penyusunan RKBMN Tahun 2024,	dikuti oleh kabag umum, kasubbag keuangan dan staf keuangan dan BMN
49.	Monitoring dan Evaluasi Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan BMN Tahun 2022	dikuti oleh kabag umum, kasubbag keuangan dan staf keuangan dan BMN
50.	memfasilitasi pelaksanaan Ujian Calon Peserta Pendidikan Khusus Keimigrasian (Dikuskim).	subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
51.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten memfasilitasi pendaftaran Katalog Elektronik (E-Katalog) Sektoral Kemenkumham. Pendampingan pendaftaran E-Katalog Sektoral Kemenkumham bisa diakses dengan gratis oleh masyarakat	UKPBJ
52.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan BPJamsostek terus berupaya meningkatkan perluasan perlindungan kepesertaan. Salah satunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi, seperti dilakukan BPJS Ketenagakerjaan oleh Kantor Cabang Grha BPJamsostek	Zoom Meeting
53.	Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kemenkumham berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) laksanakan Visitasi Penyelenggaraan SPBE di Kanwil Kemenkumham Banten,	kabag PH, kasubbag HRBTI dan staf Humas

54	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui Subbagian Program dan Pelaporan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi E-SMART dan E-Performance bagi seluruh Operator Aplikasi E-SMART dan E-Performance di Lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis se-Banten	Kabag PH, Kasubap PP
55.	Maksimalkan Peran Pengawasan, Kemenkumham Banten Ikuti Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Daa Hukdis Melalui Aplikasi SIMWas	Kepegawaian

PENINGKATAN KUALITAS FUNGSI PEROGRAM DAN PELAPORAN

Penyelenggaraan pada bagian Program dan Pelaporan sepanjang tahun 2023 di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- Penyusunan Disbursement Plan Tahun 2023;
- Penyusunan Anakabut Sarana Prasarana tahun 2023;
- Penyusunan Anakabut Anggaran tahun 2023;
- Penyusunan Procurement Plan Tahun 2023;
- Penyusunan Kalender Kegiatan dan Kalender Kerja tahun 2023;
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
- Pembuatan laporan triwulan, laporan tahunan, laporan SPIP dan laporan LKIP, Smart
- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi E-SMART dan E-Performance bagi seluruh Operator Aplikasi E-SMART dan E-Performance di Lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis se-Banten
- Upload Laporan kinerja
- Pendampingan MR

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Hasil Capaian Kinerja pada 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sam[pai bulan Desember 2022 (update 30 Desember 2022) dengan rincian sebagai berikut :

**DASHBOARD CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN**

NO	DIPA / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PERFORMANCE	EFISIENSI SUMBER DAYA
A	B	C	D	$E = \frac{(C+D)}{2}$	F=C-D
A	Kantor Wilayah Banten	110,49%	98,31%	104,39%	12,17%
1	Setjen - Dukungan Manajemen	120,00%	99,59%	109,80%	20,41%
2	Adminstrasi Hukum Umum	83,81%	99,93%	91,87%	-16,12%
3	Kekayaan Intelektual	112,00%	99,83%	105,91%	12,17%
4	Peraturan Perundang-undangan	110,00%	100,00%	105,00%	10,00%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	106,63%	99,35%	102,99%	7,29%
6	Hak Asasi Manusia	120,00%	100,00%	110,00%	20,00%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	110,00%	100,00%	105,00%	10,00%
8	Keimigrasian	120,00%	88,80%	104,40%	31,20%
9	Pemasyarakatan	111,98%	99,38%	105,68%	12,60%



PENINGKATAN KUALITAS FUNGSI HUMAS

Selama tahun 2022, Sub Bagian, Humas, dan TI melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.

- Peliputan dan Penyusunan Berita Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten selama tahun 2022.
- Deklarasi Janji Kinerja 2022
- Publikasi kegiatan Kanwil Kemenkumham Banten, dalam bentuk: pembuatan laporan RKT RB, iklan dan *pres conference*, dokumentasi, spanduk, backdrop, dan Baner dan media sosial lainnya seperti instagram, Facebook, Tweter, dan youtube.
- Kerjasama Instansi dengan Ombudsman Perwakilan Banten Kerjasama yang dilakukan dalam rangka menciptakan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 yang jujur dan transparan.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

PENINGKATAN KUALITAS FUNGSI KEUANGAN DAN BMN

Selama Tahun 2022 melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.

- Lakukan Penyusunan RKBMN Tahun 2023
- Monitoring dan Evaluasi Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan BMN Tahun 2022

• CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TA. 2022

REALISASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DIPA / PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	Kantor Wilayah Banten	350.701.938.000	344.768.010.757	98,31%
1	Setjen - Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	16.666.424.000	16.598.879.937	99,59%

2	Administrasi Hukum Umum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.965.493.000	1.964.034.532	99,93%
3	Kekayaan Intelektual Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.056.476.000	1.054.645.682	99,83%
4	Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	262.000.000	262.000.000	100%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah & Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	1.725.866.000	1.714.585.949	99,35%
6	Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	224.984.000	224.982.000	100%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	180.218.000	180.218.000	100%
8	Keimigrasian Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	35.926.438.000	31.901.556.065	88,80%
9	Pemasyarakatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	292.694.039.000	290.867.108.592	99,38%

- HASIL CAPAIAN KINERJA**

Selama periode tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Dari total 58 target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, hasil rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada periode tahun 2022 yaitu sebesar 155,86% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 67.31%.

Perhitungan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) yang telah ditetapkan dengan realisasi capaiannya. Realisasi capaian kinerja tersebut mengacu berdasarkan hasil capaian indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan hasil pelaksanaan kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA/SATUAN KERJA/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		EFISIENSI SUMBER DAYA
		KINERJA ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	
A	Kantor Wilayah Banten	96,16%	155,86%	59,70%
1	Divmin - Dukungan Manajemen	99,00%	127,58%	28,58%
2	Imigrasi	79,17%	127,61%	48,43%
3	Pemasyarakatan	98,90%	112,92%	14,02%
4	Administrasi Hukum Umum	99,86%	233,54%	133,68%
5	Kekayaan Intelektual	99,54%	250,00%	150,46%
6	Badan Pembinaan Hukum Nasional	99,77%	187,96%	88,18%
7	Peraturan Perundang-undangan	100,00%	112,50%	12,50%
8	Hak Asasi Manusia	100,00%	129,17%	29,17%
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	99,99%	121,43%	21,44%

- PENAMBAHAN BARANG – BARANG INVENTARIS KANTOR PADA TAHUN 2022 SEBAGAI BERIKUT :**

No	Jenis Barang	Volume Kegiatan	Keterangan
1	Lap Top	8 unit	Pembelian Kanwil/Ditjen KI
2	Scanner	4 Unit	Pembelian kanwil
3	Printer	8 Unit	Pembelian kanwil/ Ditjen AHU
4	Infocus	2 Unit	Pembelian kanwil
5	Layar Infocus	2 Unit	Pembelian kanwil
6	Sound System	1 Paket	Pembelian Kanwil
7	Camera Digital	3 Unit	Pembelian Kanwil/Ditjen KI
8	Gimbal Elektrik	1 Unit	Pembelian Kanwil
9	Alat Penghancur Kertas	4 Unit	Pembelian Kanwil
10	AC	4 Unit	Pembelian Kanwil
11	TV Android 65"	3 Unit	Pembelian Kanwil
12	TV Android 32"	4 Unit	Pembelian Kanwil
13	Microphone Wirelles	1 Unit	Pembelian Kanwil
14	Lampu Emergency	6 Unit	LP Serang, Rutan Pandeglang, Lp Rangkas
15	PC Unit	1 Unit	Ditjen AHU

- Pengurangan barang – Transfer Keluar BMN kantor pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume	Keterangan
1	Rumah Negara Gol. 1 Tipe C Permanen	1 unit	Ke Rutan serang

PENINGKATAN KUALITAS FUNGSI KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

Untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan fungsi kepegawaian, Subag Kepegawaian dan TU menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menopang Penatausahaan dan Pembinaan/Pengembangan Kepegawaian untuk 1.286 pegawai, dengan berbagai kegiatan diantaranya ialah:

- **data pegawai jajaran kanwil kemenkumham Banten tahun 2021**

Jumlah pegawai Kanwil dan UPT pada akhir Tahun 2022 sebanyak 1.687 orang, terdiri dari :

NO	UPT	JUMLAH
1	Kantor Wilayah Banten	132 Orang
2	LAPAS Kelas I Tangerang	170 Orang
3	LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang	202 Orang
4	LAPAS Perempuan Kelas IIA Tangerang	84 Orang
5	LAPAS Kelas IIA Tangerang	75 Orang
6	LPKA Kelas I Tangerang	87 Orang
7	LAPAS Kelas IIA Serang	90 Orang
8	LAPAS Kelas III Cilegon	102 Orang
9	LAPAS TERBUKA Ciangir	44 Orang
10	RUTAN Kelas I Tangerang	146 Orang
11	RUTAN Kelas IIB Serang	81 Orang
12	RUTAN Kelas IIB Pandegelang	57 Orang
13	LAPAS Kelas II Rangkasbitung	62 Orang
14	BAPAS Kelas IISerang	41 Orang
15	BAPAS Kelas I Tangerang	68 Orang
16	BAPAS Kelas II Ciangir	20 Orang
17	RUPBASAN Serang	22 orang
18	Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	124 Orang
19	Kantor Imigrasi Kelas I Serang	43 Orang
20	Kantor Imigrasi Kelas I Cilegon	37 Orang

- **statistik pegawai berdasarkan golongan**

Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
I/d	0
II/a	527

II/b	2
II/c	71
II/d	54
III/a	201
III/b	287
III/c	209
III/d	198
IV/a	42
IV/b	23
IV/c	7
IV/d	1

Dari statistik pegawai berdasarkan golongan ruang diatas terlihat bahwa 66,25% atau sejumlah 895 orang pegawai merupakan pegawai dengan golongan III. Hal ini merupakan *human capital* yang sangat potensial bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Banten

- **statistik pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah
SLTP	2
SLTA	829
DIPLOMA	56
S1	589
S2	148
S3	1

Sedangkan dari segi pendidikan, lulusan SLTA dan S1 masih mendominasi dengan rincian pegawai dengan pendidikan SLTA sejumlah 829 orang dan yang berpendidikan S1 sejumlah 589 orang. Lulusan S2 hanya terdapat 148 orang pegawai dan hanya terdapat seorang pegawai dengan gelar Doktor

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mewujudkan Petugas UPT Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI) merupakan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan UPT Pemasyarakatan. Oleh sebab itu untuk merealisasikan rencana dimaksud Divisi Pemasyarakatan melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini sebagaimana fungsi Divisi Pemasyarakatan yakni, Pembinaan dan

pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dn komunikasi, keamanan, kesuhatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasaranan, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah dan mengawasi masuknya barang illegal di dalam LP/Rutan, Upaya dalam menjaga stabilitas keamanan dalam LP/Rutan, dan mencegah kaburnya Napi/Tahanan.

- a. Optimalisasi pemberdayaan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (satopsPatnal) Pemasyarakatan di tingkat Wilayah (Divisi Pemasyarakatan) dan Satuan Kerja di Wilayah Banten, dengan melakukan kegiatan Deteksi Dini, Berantas Narkoba, dan *Back to Basic*
- b. Optimalisasi sinergitas dengan instansi terkait pada kegiatan Dilkumjakpol dan Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, dan saat ini telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Banten, Komando Resor Militer 064/ Maulana Yusuf, dan BNN Provinsi Banten
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Sistem Keamanan di Lapas dan Rutan dengan Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan (SIKAMPAS).
- d. Meningkatkan Kapasitas Fisik Mental dan Disiplin Petugas.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membawahi 16 UPT Pemasyarakatan yang terdiri dari : 8 Lapas, 3 Rutan, 1 LPKA, 3 Bapas, dan 1 Rupbasan. Kapasitas Lapas/Rutan se-Banten :5.197 orang. Isi Lapas/Rutan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah 10.219 orang, terdiri dari

1.	Narapidana Dewasa Laki-laki	8076 Orang
2.	Tahanan Dewasa Laki-laki	1328 Orang
3.	Narapidana Anak Laki-laki	28 Orang
4.	Tahanan Anak Laki-laki	5 Orang
5.	Narapidana Dewasa Perempuan	762 Orang
6.	Tahanan Dewasa Perempuan	20 Orang
7.	Narapidana Anak Perempuan	-
8.	Tahanan Anak Perempuan	-
	TOTAL	10.219 Orang

Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Warga Binaan Perkara Narkoba bersama dengan Polisi Daerah Provinsi Banten. diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Banten Banten, Pejabat Struktural Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Serang Raya.	Pelaksanaan pada bulan Februari 2021 diikuti oleh seluruh pejabat di div.pemasyarakatan dan Ka UPT
2.	Kegiatan Bimtek Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2022, kegiatan bimbingan teknis tenaga pendukung SPPT-TI tahun 2021, Sosialisasi Teknis Keamanan, Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM	kegiatan-kegiatan Bimtek dilaksanakan selama periode januari – desember 2022
3.	Melaksanakan penggeledahan rutin ke seluruh UPT dan pengawasan secara berkala dengan menggandeng pihak terkait, Sebagai upaya P4GN dan mewujudkan Zero Halinar di Lapas dan Rutan	Pelaksanaan penggeledahan dilaksanakan selama bulan januari-desember 2022 bekerjasama dengan pihak kepolisian,

4.	Penguatan ke seluruh UPT dalam rangka mendorong Ka. Satker Maksimalkan Fungsi Bimtorwasdal	dilaksanakan sepanjang bulan januari – desember 2022
5.	Melakukan Monitoring Klinik Dan Program Rehab Di seluruh UPT, dalam rangka memaksimalkan kegiatan rehab pada satuan kerja	dilaksanakan berkala pada periode januari- desember 2022
6.	melaksanakan pemberian remisi, CB,CMB pada Narapidana yang sudah memenuhi syarat mendapatkan hak nya	dilaksanakan di setiap UPT se wilayah banten
7.	melakukan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Bahan Makanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan secara Virtual melalui aplikasi Zoom. Di hari pertama penilaian diikuti oleh 2 (dua) UPT Pemasyrakatan yaitu, Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyrakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.	Sesuai dengan arahan Direktur Kesehatan dan Perawatan Direktorat Jenderal Pemasyrakatan terkait pelayanan menyediakan makanan untuk Warga Binaan
8.	, 2 (dua) Satuan Kerja Pemasyrakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten berhasil meraih Peringkat Tertinggi I dan II sebagai Satuan Kerja dengan Publikasi terbanyak. Adapun 2 (dua) Satuan Kerja tersebut adalah Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang yang berada di Peringkat I dengan total 311 berita dan Lapas Kelas III Rangkasbitung yang berada di Peringkat II dengan total 179 berita.	memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang mendapatkan penghargaan tersebut

- **Rekapitulasi Pertukaran Data Tahanan dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Tahun 2022**

No	Nama Satuan Kerja	Melakukan Pertukaran Data		Pertukaran Data			
		Ya	Tidak	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan	MA
1	Lapas Kelas IIA Cilegon		√	0	11	2	6
2	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang		√	0	0	0	0
3	Lapas Kelas III Rangkasbitung	√		0	436	0	0
4	LPKA Kelas I Tangerang	√		0	0	0	0
5	Lapas Kelas IIA Tangerang		√	0	0	0	0
6	Rutan Kelas I Tangerang	√		0	0	682	0
7	Rutan Kelas IIB Pandeglang	√		3	9	5	0
8	Rutan Kelas IIB Serang		√	0	20	10	5
TOTAL				3	467	699	11

Sumber : Laporan UPT Lapas/Rutan

- **perbandingan jumlah wbp dengan kapasitas lapas/rutan se-banten**

No	UPT	JUMLAH TAHANAN	JUMAH NAPI	JUMLAH Tahanan & Napi	Kapasitas	%
						Over Kapasitas
1.	LAPAS Kelas I Tangerang	5	1.822	1.827	600	304
2.	LAPAS Pemuda Kelas IIA Tangerang	648	2.393	3.041	1.251	243
3.	LAPAS Perempuan Kelas IIA Tangerang	0	326	326	250	130
4.	LAPAS Kelas IIA Tangerang	7	399	406	600	68
5.	LPKA Kelas I Tangerang	0	44	44	220	243
6.	LAPAS Kelas IIA Serang	7	708	715	425	168
7.	LAPAS Kelas III Cilegon	124	1.729	1.853	700	265
8.	LAPAS TERBUKA Ciangir	0	4	4	60	7
9.	LAPAS Kelas II Rangkasbitung	83	170	253	100	253
10.	RUTAN Kelas I Tangerang	123	1.025	1.148	596	193
11.	RUTAN Kelas IIB Serang	211	329	540	274	197
12.	RUTAN Kelas IIB Pandegelang	160	69	229	121	189
Total		13.68	9.018	10.386	5.197	2.260

Dari table diatas dapat dilihat bahwa hampir semua Unit Pelaksana Teknis di wilayah Banten telah mengalami over kapasitas terutama pada Lapas Kelas I tangerang, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Lapas Kelas III Cilegon dan Rutan Kelas I Tangerang

- **Jumlah Bimbingan Klien dan Litmas Pada Bapas**

NO	Satuanh Kerja	Bimbingan Klien	Litmas
1.	Bapas Kelas I Tangerang	1376 Orang	55 Orang
2.	Bapas Kelas II Ciangir	1878 Orang	1378 Orang
3.	Bapas Kelas II Serang	0	0

- **Pengelolaan Basan dan Baran**

No	Satuan Kerja	BS1 (Kepolisian)	BS2(Kejaksaan)
1	Rupbasan Serang	6	33

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. Untuk merealisasikan fungsi tersebut dan upaya pencapaian kinerja tahun 2021, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan yang sebelumnya sudah tercantum didalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2022

Capaian Kinerja Divisi Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Tahun 2022

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Tim Wasdakim Kumham Banten Tinjau Pelabuhan Khusus Pt Cemindo Gemilang Plant Bayah	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2022

2.	<p>Sosialisasi Pelayanan Eazy Passport, Eazy Passport, Cara Mudah Buat Passport Di Masa Pandemi Covid-19, Sosialisasi Optimalisasi Pengawasan Administratif Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pentingnya Peran Pengawasan Administratif Keimigrasian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Diseminasi Layanan Izin Tinggal melalui Aplikasi Izin Tinggal Online (IT Online), Whatsapp dan Email Resmi Kantor Imigrasi yang digelar oleh Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Keimigrasian secara Virtual, Supervisi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Laporan Harian Intelijen (LHI) yang diikuti oleh jajaran Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi se-Indonesia secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting</p>	<p>Di Selenggarakan Oleh Div.Keimigrasian</p>
3.	<p>Melaksanakan Operasi Gabungan Pada Pelabuhan, PLTU dan PT pada wilayah kerja Kanwil Banten</p>	<p>dilaksanakan sepanjang periode januari-desember 2021</p>
4.	<p>Mengikuti Sosialisasi Optimalisasi Pengawasan Administratif, Sosialisasi Penggunaan Apoa,</p>	<p>dilaksanakan pada tahun 2022</p>
5.	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada upt imigrasi di lingkungan kanwil Banten, yang di vokuskan pada layanan masyarakat terkait pembuatan paspor dll</p>	<p>dilaksanakan 6 kali pada tahun 2022</p>
6.	<p>Penandatanganan Pks Antara Kanim Tangerang Dengan Kepolisian Terkait Laporan Keberadaan Orang Asing</p>	<p>di hadiri oleh instansi terkait</p>
7.	<p>Monitoring Layanan Paspor Di Mall Pelayanan Publik Pandeglang</p>	<p>dilaksanakan kegiatan monev per tiga bulan sekli</p>
8.	<p>Koordinasi Dengan Dirintelkam Polda Banten Untuk Lakukan Pendataan Sedianya, Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum.</p>	<p>kegiatan dilaksanakan di polda banten</p>

9.	Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten adalah Rapat Koordinasi TIMPORA pada Maret 2022 bertempat di Swiss Bell Hotel, Cikande dan Operasi Gabungan TIMPORA Tingkat Propinsi pada Juni 2022 di wilayah Tangerang dan pada Nopember 2022 Operasi Gabungan Laut “Merak Kondusif Tahun 2022” di wilayah Cilegon. Selain mengadakan TIMPORA Tingkat Provinsi, Divisi Keimigrasian juga hadir dan memonitor kegiatan TIMPORA Tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan oleh Kantor Imigrasi di wilayah Banten;	
----	---	--

Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan intelijen dan operasi pengawasan keimigrasian baik secara mandiri maupun gabungan bersama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA); Kegiatan intelijen dan pengawasan mandiri yang dilakukan baik oleh Divisi Keimigrasian maupun Kantor Imigrasi berkembang kepada kegiatan penindakan dan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum, berikut merupakan data penyidikan dan penindakan keimigrasian pada Tahun 2021 di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten:

NO	SATKER	OPERASI MANDIRI	PROJUSTITIA	TINDAKANADMINI STRATIF KEIMIGRASIAN (TAK)
1.	Divisi Keimigrasian	20 kegiatan	-	-
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	241 kegiatan	1	74
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	33 kegiatan	-	3
4.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	18 kegiatan	-	-

Kegiatan pelayanan Eazy Passport yang dilaksanakan pada periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SATKER	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN EAZY PASSPORT	JUMLAH PEMOHON YANG DILAYANI
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	27 Kegiatan	1185 pemohon
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	6 Kegiatan	168 pemohon
3.	Kantor Imigrasi Kelas II TPIClegon	6 Kegiatan	101 pemohon
Total		39 Kegiatan	1.454 pemohon

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, pada periode Tahun 2022 seluruh Kantor Imigrasi di wilayah Banten telah melaksanakan sosialisasi dan melakukan pelayanan Eazy Passport sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan pelayanan Eazy Passport, dan pemohon yang dilayani sebanyak 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) pemohon. Kegiatan pelayanan Eazy Passport dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pengendalian / pencegahan Covid-19.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, pada Tahun 2022 seluruh Kantor Imigrasi di wilayah Banten telah melaksanakan sosialisasi pelayanan Eazy Passport melalui media sosial dan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi instansi pemerintah maupun swasta dan melaksanakan Eazy Passport dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pengendalian/pencegahan Covid-19.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2022 pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan Hukum dan Ham dilaksanakan pada pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah,

pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan. Dengan kegiatan sebagai berikut

Capaian Kinerja Divisi Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Tahun 2022

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris, Notaris Pengganti dan PPNS	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2022
2.	Kadiv Yankum Pimpin Rapat Inventarisasi Mou Dan Perjanjian Kerjasama Dengan Stakeholder, Rapat inventarisasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dilakukan untuk mencari data Mou dan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilakukan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan Unit Pelaksana Teknis dengan Instansi Terkait.	kegiatan dilaksanakan di awal tahun untuk kerja sama antar instansi dan stakeholder
3.	Melakukan Koordinasi Dengan Diki, Koordinasi Dan Konsultasi Kadiv Yankumham Ke Direktorat Jenderal Ham, Koordinasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Organisasi Bantuan Hukum (OBH), menggelar Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM	kegiatan dilaksnakan sepanjang bulan januari – desember 2022
4.	rakor fasilitasi harmonisasi raperda, Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dengan Instansi terkait,	kegiatan d laksanakan oleh perancang sepanjang bulan januari – desember 2022
5.	menyelenggarakan kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) guna memberikan pengetahuan akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal. Kepala Kantor Wilayah, Menyelenggarakan Diseminasi Dan Promosi Terkait Paten, Merek Dan Indikasi Geografis Bertempat Di Hotel Royale Krakatau	kegiatan dilaksankn oleh kasubbid kekayaan intelektual dan staf KI
6.	menggelar kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2022	kegiatan dilaksnakan sepanjang bulan januari – desember 2022

7.	menyelenggarakan sosialisasi mengenai tata cara pemeriksaan notaris untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan, Rapat Persiapan Sosialisasi Implementasi Bisnis Dan Ham,	Bertempat di Ruang Rupatama Polda Banten, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Irwasda Polda Banten, Kombes (Pol) Ady Soeseno.
8.	menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang	melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
9.	Gelar Raker Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi Ranham Kakanwil Buka Promosi Dan Diseminasi Paten Di Wilayah Kota Tangerang Kakanwil Ajak Masyarakat Daftarkan Kekayaan Intelektual Agar Terlindung Hukum Secara Pasti	Dilikuti Perwakilan Skpd Kab/Kota Provinsi Banten, Kanwil Kemenkumham Banten
10.	Gelar Workshop Pengenalan Aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (Prisma) Sebagai Implementasi Bisnis Dan Ham Di Indonesia Buka Workshop Implementasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia,	kegiatan dilaksanakan sepanjang bulan januari – desember 2021

Laporan Desiminasi Tentang Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Ownership) di Provinsi Banten

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah berupaya untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Peraturan Presiden ini juga mewajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai Pemilik Manfaat Korporasi guna melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), dan kemudahan berinvestasi.

Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi yaitu para yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi adalah mereka yang berhak atau menerima manfaat dari perusahaan

baik secara langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan.

Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Rekapitulasi Pengambilan Sumpah Notaris Selama Tahun 2022

NO	Tanggal	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	15 Januari 2021	Puspasari Dewi , SH.M.Kn.	kota Tangerang	NP
2.	25 januari 2021	Melvinancy Margareth Mendrofa, SH.,M.Kn	kota Tangerang	NP
3.	15 Februari 2021	Bayu Prasetyo, SH	Kota Tangerang Selatan	NP
4.	14 April 2021	Erna Sugianto,SH.M.Kn	Kota Tangerang Selatan	NP
5.	17 Mei 2021	Farida Indriani, SH	kab.Tangerang Selatan	NP
		Dini Yuliani,SH	kab.Tangerang	NP
6.	28 Juni 2021	Aditya Revano ,SH.,M.K.n	Kota Cilegon	NP
7.	14 Juli 2021	Maria Suzanna Padmini,SH	Kota Tangerang Selatan	NP
8.	21 September 2021	Athika Fitra Rahmadinita,SH.,M.Kn	Kota Tangerang Selatan	NP

Rekapitulasi Pengambilan Sumpah PPNS Selama Tahun 2022

NO	Tanggal/Bulan	Nama/ NIP/Tempat Tgl Lahir	Instalasi/Wilayah Kerja
1.	01 November 2021	Asril Ibnu Efendhy	Dinas Perhubungan kota Cilegon

Data Permohonan Kewarganegaraan

NO	Permohonan	Nama	Alamat
1.	Pasal 8 (permohonan orang asing melalui naturalisasi atau permohonan sendiri)	Soo Eun Lee	Kota Tangerang Selatan
2.	Pasal 8 (permohonan orang asing melalui naturalisasi atau permohonan sendiri)	Ricci	Kota Tangerang Selatan
3.	Pasal 8 (permohonan orang asing melalui naturalisasi atau permohonan sendiri)	Jasmine Ricci	Kota Tangerang Selatan

Matriks Jumlah Pendaftar Perseroan Perorangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten

NO.	Kanwil	Jenis	Jumlah pendaftar sampai desember 2022
	BANTEN	Perseroan	320
TOTAL			320

Matriks Jumlah Pelapor Pemilik Manfaat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten

Kanwil	Jenis Korporasi	Jumlah Korporasi	Sudah Melapor BO	Belum Melapor BO	Prosentase
BANTEN	Perseroan (PT)	74.399	22.136	52.263	29.75%
	Yayasan	17.710	2.429	15.281	13.72%
	Perkumpulan	2.072	383	1.689	18.48%
	Koperasi	8.104	370	7.734	4.57%
	Firma	267	101	166	37.83%
	Persekutuan Komanditer (CV)	19.310	7.825	11.485	40.52%
	Persekutuan Perdata	182	94	88	51.65%
	Total	122.044	33.38	88.706	196.52%

7 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual:

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kerja Sama Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Serang. Dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 di Hotel Forbis Kabupaten Serang;
2. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kerja Sama Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Pandeglang. Dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 di Hotel Horison Altama Kabupaten Pandeglang;
3. Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kota Tangerang Selatan. Dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 di Gedung Balaikota Kota Tangerang Selatan. Mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari pelaku IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, dan Dinas Pariwisata KotaTangerangSelatan;
4. Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Tangerang. Dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 di Gedung Usaha Daerah Kabupaten Tangerang. Mengundang 100 peserta yang terdiri dari pelaku IKM, pelaku UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang;
5. Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Serang. Dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang. Mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Kegiatan Webinar Antisipasi Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022. Mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Fakultas Hukum yang berada di Provinsi Banten;
7. Kegiatan Webinar Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022. Mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Fakultas Hukum yang berada di Provinsi Banten.

9 Promosi/Diseminasi/Sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual di wilayah Banten

No	Kegiatan	Peserta	Tempat
1.	Promosi dan Diseminasi Paten	100 orang peserta yang terdiri dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,	Hotel Royale Krakatau

	Kota Cilegon	Universitas Faletahan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon	
2.	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Serang	50 orang peserta yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon, serta Pelaku Seni dan Budaya Kabupaten Serang;	Hotel Forbis Kabupaten Serang
3.	Promosi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Pandeglang	50 orang peserta yang terdiri dari pelaku UMK, pelaku IKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pandeglang, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pandeglang	Hotel Horison Altama
4.	Sosialisasi Paten di Kota Tangerang	100 orang peserta yang terdiri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Tangerang;	Hotel Golden Tulip Essential
5.	Promosi dan Diseminasi Paten, Merek, dan Indikasi Geografis	100 orang peserta yang terdiri dari IKM dan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon	Hotel Royale Krakatau Kota Cilegon
6.	Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kota Tangerang	50 orang peserta yang terdiri dari pelaku UMK dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Tangerang	Days Hotels & Suites, Kota Tangerang

7.	Sosialisasi Indikasi Geografis Kabupaten Pandeglang	di Kabupaten Pandeglang, Kelompok Tani Talas Beneng Pandeglang, BPTP Banten	Hotel Horison Altama Pandeglang
8.	Webinar Promosi & Diseminasi Paten.	Mengundang Sentra Kekayaan Intelektual milik Perguruan Tinggi yang berada di Provinsi Banten	-
9.	Webinar Sosialisasi Kekayaan Intelektual	Mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Fakultas Hukum yang berada di Provinsi Banten;	-

Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2022:

Total jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang masuk dari wilayah Provinsi Banten adalah sebanyak 9951 Permohonan Kekayaan Intelektual, dengan rincian seperti tercantum dalam grafik di bawah ini:

Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	Total Permohonan
7322	62	133	2433	9951

Sepanjang tahun 2022 tepatnya pada bulan Desember 2022 telah dilaksanakan pemantauan produk di 2 lokus yaitu:

1. Mall Rabinza Plasa di Kabupaten Lebak, dan
2. Griya Gemilang di Kabupaten Tangerang

Selain itu pada tanggal 14 Oktober 2022 telah berhasil diselenggarakan mediasi dalam rangka penyelesaian pelanggaran Kekayaan Intelektual di bidang Merek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dibantu oleh mediatir Kekayaan Intelektual DJKI.

Perancang Perundang-undangan di Kantor Wilayah Banten Tahun 2022

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1.	Tanti Fristianti, SH	198104082005012001	Penata (III/c)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda

2.	Huda Hardiyanto, SH	198304042009121002	Penata (III/c)	Fungsional Perancang PUU Ahli Madya
3.	Melinda Ayuthia, SH, MH	198203042005012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
4.	Mas Bayu Budiono, SH	198609082010121006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
5.	Sumarni, SH, MH	197512252010122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
6.	Rahmad Rangga Lawe, SH	198305262010121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
7.	Surya Bintara, SH	198007012002121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
8.	Agustinus Mas Galih Uji Setiawan, SH, MH	198501102010121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
9.	Hapiz Zulkarnain, SH	198110202009011009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
10.	Sulistriani, SH, MH	197509212009122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
11.	Maeka Yusnita Hutagaol, SH	198603222012122001	Penata Muda (III/a)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda
12.	Dita Yunistia Fitrotin, SH	198603222010122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Perancang PUU Ahli Muda

JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2022

Rekap Rancangan Peraturan Daerah = 78 Raperda

NO	Wilayah	Perda
1.	Pemerintah Provinsi Banten	12
2.	DPRD Provinsi Banten	3
3.	DPRD Kota Tangerang Selatan	3
4.	Pemerintah Kota Tangerang	11
5.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	10
5.	Pemerintah Kota Cilegon	8
6.	Pemerintah Kota Serang	4
7.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	17
8.	Pemerintah Kabupaten Lebak	6
9.	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	4
TOTAL		78

Rekap Rancangan Peraturan Kepala Daerah = 75 Raperkada

NO	Wilayah	Raperkada
1.	Pemerintah Provinsi Banten	6
2.	Pemerintah Kota Tangerang	39
3.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	15
4.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	8
5.	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	7
TOTAL		75

Rekap Rancangan Peraturan DPRD = 2 Rancangan Peraturan DPRD

NO	Wilayah	Rancangan DPRD
1.	DPRD Kota Tangerang	1
2.	DPRD Kota Tangerang Selatan	1
TOTAL		2

Data OBH Provinsi Banten

No	Provinsi	Nama OBH	Jumlah Penerima	Nilai rata-rata
1.		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Keadilan Banten	11	57,64
2.		Posbakumadin Serang	11	57,27

3.	B A N T E N	Lkbh Fakultas Syariah Dan Ekonomi lain Sultan Maulana Hasanuddin	1	62
4.		Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Forum Pemerhati Pembangunan (Fpp)	2	67
5.		Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri - Banten Disingkat Plbhmb	11	56,82
6.		Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (Plbh) Jatramada	13	49,85
7.		Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Cabang Tigaraksa	3	66,33
8.		Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten	10	59
9.		Perkumpulan Law Firm Isbanri & Rekan	11	67
10.		Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tangerang	15	57,13
11.		Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening	2	62,5
12.		Lembaga Bantuan Hukum Matahati	12	56,58
13.		Posbakumadin Kabupaten Tangerang	6	60,83
14.		Posbakumadin Jakarta Cabang Kota Tangerang Selatan	10	55,7
15.		Yayasan Bantuan Hukum Mutiara Indah	7	65,71
16.		Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru	9	50,56
17.		Lawfirm Mufti Rahman & Rekan	8	56,75

kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Kelompok Kadarkum TA 2022

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok kadarkum dikelurahan cilenggeng, kecamatan serpong, kota tangerang selatan di balai warga dengan peserta 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan di tiga (tiga) titik dengan masing-masing peserta 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari anggota kelompok kadarkum dan aparat kelurahan
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok kadarkum dikelurahan rempoa, kecamatan ciputat timur, kota tangerang selatan di aula kelurahan rempoa dengan peserta 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari anggota kelompok kadarkum dan aparat kelurahan

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok kadarkum dikelurahan cirendeudeu, kecamatan ciputat timur, kkota tangerang selatan di balai warga dengan peserta 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakn di 3 (tiga) titik dengan masing-masing peserta 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari anggota kelompok kadarkum dan aparat kelurahan

**Tabel Capaian Aksi Ham B-04
Pemerintah Daerah Provinsi Banten**

Pemerintah Daerah	Kelompok Sasaran									TOTAL RATA-RATA NILAI	
	PEREMPUAN				ANAK			PD	MHA		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Provinsi Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel Capaian Aksi Ham B-08
Pemerintah Daerah Provinsi Banten**

Pemerintah Daerah	Kelompok Sasaran									TOTAL RATA-RATA NILAI	
	PEREMPUAN				ANAK			PD	MHA		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Provinsi Banten	0	0	0	87,5	0	0	0	0	0	0	9,722222222

Tabel Capaian Aksi Ham B-04 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

No	Pemerintah Daerah	Kelompok Sasaran									TOTAL RATA-RATA NILAI
		PEREMPUAN				ANAK			PD	MHA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kab. Pandeglang	87,5	TL	100	50	100	100	100	TL	100	70,83333
2	Kab. Lebak	100	100	100	100	100	100	100	100	75	97,22222
3	Kab. Tangerang	0	0	0	87,5	0	0	100	87,5	0	30,55555
4	Kab. Serang	100	100	100	100	100	100	100	100	87,5	98,61111

5	Kota	87,5	50	100	100	100	50	100	50	50	76,38888
6	Kota	87,5	100	100	100	100	87,5	87,5	100	100	95,83333
7	Kota	62,5	87,5	100	100	75	75	100	75	25	77,77777
8	Kota Tangerang Selatan	100	87,5	100	100	100	62,5	100	100	100	94,44444 444

Tabel Capaian Aksi Ham B-08 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

No	Pemerintah Daerah	Kelompok Sasaran									TOTAL RATA-RATA NILAI
		PEREMPUAN				ANAK			PD	MHA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kab. Pandeglang	50	TL	0	0	87,5	100	100	TL	0	37,5
2	Kab. Lebak	75	75	87,5	100	75	100	100	75	100	87,5
3	Kab. Tangerang	0	0	0	100	0	0	87,5	50	0	26,38888
4	Kab. Serang	100	100	100	100	100	100	100	100	37,5	93,05555
5	Kota	50	50	100	100	75	50	100	50	50	69,44444
6	Kota	100	50	100	100	75	87,5	87,5	75	50	80,55555
7	Kota	50	50	100	100	100	75	75	50	25	69,44444
8	Kota Tangerang Selatan	100	75	100	100	100	62,5	100	75	50	84,72222 222

Keterangan :

1. PD : Penyandang Disabilitas
2. MHA : Masyarakat Hukum Adat
3. TL : Tidak Laport

Uraian yang telah diuraikan di atas merupakan hasil capaian Aksi HAM B04 dan B08 Tahun 2022, sedangkan untuk capaian Aksi HAM B12 sampai dengan penyusunan laporan evaluasi ini

disusun masih dalam masa pelaporan ke dalam Serambi KSP. Masa pelaporan capaian Aksi HAM B12 berlangsung dari Tanggal 28 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2022

C. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Lambatnya perkembangan reformasi birokrasi (RB) di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain seperti minimnya pemahaman aparatur negara mengenai RB dan kesadaran aparatur Negara untuk melakukan pembenahan pada sistem birokrasi itu sendiri. Kualitas aparatur negara yang dinilai kurang cakap dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dapat menghambat perkembangan RB itu sendiri, dimana perkembangan teknologi informasi, jika dimanfaatkan secara optimal dapat memotong alur birokrasi yang dinilai terlalu berbelit-belit, serta mampu untuk mempersingkat proses kerja. Seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten agar dampak positif dari perubahan penyelenggaraan negara dalam hal pelayanan itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government dan good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 area perubahan dan 1 program Quick Wins RB (Area Manajemen Perubahan

Pembangunan Zona Integritas merupakan *pilot project* Reformasi Birokrasi dan merupakan alat ukur Evaluasi Kinerja Organisasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level satuan kerja. Dalam mewujudkan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani seluruh Jajaran dari Pimpinan tertinggi hingga ke lini terbawah harus ikut serta dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan penanaman komitmen dan semangat dalam hati guna mewujudkan keberhasilan tersebut. Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak dapat diraih jika hanya Pimpinan Tertinggi saja yang berkomitmen tanpa adanya semangat, dukungan, bekerja dan berkinerja yang baik dari seluruh Jajaran pegawai.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai PASTI di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Kantor Wilayah Banten.

Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Guna pencapaian target kegiatan reformasi birokrasi triwulan III tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi B09 Tahun 2022 yang mencakup 4 (empat) area perubahan sesuai dengan target dalam Matriks Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

- Melakukan Internalisasi Tata Nilai PASTI melalui kegiatan apel pagi dan sore/coffe morning/rapat internal/workshop/ dll yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan

2. Penguatan Akuntabilitas

- Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui aplikasi e-Monev,SMART, e-Tarja dan e-Performance
- Melakukan Coaching and mentoring terkait tugas pokok dan fungsi secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:

1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan
2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan
3. penguatan integritas organisasi

3. Penguatan Sistem Pengawasan

1. Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM (berdasarkan standarisasi gedung kantor dan sarana kerja kantor wilayah)
2. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala
3. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reuiu tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dalam upaya peningkatan pelayanan internal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan :

- 1 Evaluasi standar pelayanan di Kemenkumham

- 2 Pelaksanaan Kampanye Publik terkait pelayanan dengan Pembuatan Bahan- Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
- 3 Melakukan Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui pengisian konten Reformasi Birokrasi pada website dan media sosial masing-masing unit

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada triwulan tahun 2021 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup RKT RB 4 (empat) area perubahan yaitu :
 - 1) Manajemen Perubahan
 - 2) Penguatan Akuntabilitas
 - 3) Penguatan Sistem Pengawasan dan
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK.1-OT.03-003 tanggal 04 Januari 2022 hal Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman ZI Menuju WBK WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mencakup 6 (enam) area perubahan yaitu :

- 1) Manajemen Perubahan
 - 2) Penataan Tata Laksana
 - 3) Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 4) Penguatan Akuntabilitas
 - 5) Penguatan Sistem Pengawasan
 - 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berisi mengenai capaian program dan kegiatan implementasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sepanjang tahun 2022
 3. Secara keseluruhan, pencapaian seluruh program Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada triwulan III tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam matriks rencana kerja

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

penyusunan Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya di wilayah DIY. Laporan Tahunan ini menyajikan rangkuman pencapaian kinerja dan kegiatan selama periode Januari s/d Desember 2022 yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, yang meliputi hambatan atau kendala, upaya yang telah dilakukan, maupun langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi kedepan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait penyerapan anggaran, yakni terkait dengan adanya kebijakan nasional tentang revisi anggaran yang berimplikasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun anggaran 2021. Hal tersebut kemudian berdampak pada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal tahun. Selain hal tersebut, beberapa persoalan lainnya ialah, belum tercapainya target dan perlu mendapat perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan proses bisnis di internal Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Penyusunan Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan oleh Pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk kegiatan tahun selanjutnya.

B. SARAN

Sebagai perbaikan, beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut di antaranya lain adalah:

- 1 Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas;

- 2 Meminimalisir adanya revisi anggaran, sehingga penyerapan dan kegiatan akan sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan;
- 3 Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
- 4 Mempertimbangkan saran dari *stakeholder* terkait dalam rangka peningkatan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- 5 Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis;
- 6 Mengusahakan melengkapi sarana dan prasana sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten

Akhirnya, perlu disadari bahwa pekerjaan tugas dan tanggung jawab di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten sangatlah kompleks dan tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh *stake holder* dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan dimulai dengan dilakukannya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan baik.

Tahap selanjutnya adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak atau instansi terkait, seluruh *stake holder*, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam hal perencanaan, perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas di Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dan terpadu.

Semoga Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Tahun Anggaran 2022 serta menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada publik



Serang, 10 Januari 2022
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sri Yusfini Yusuf

Nip. 197502152001122001